

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PER SUB SEKTOR DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

M. TAHIR KASNAWI

ABSTRACT

Indicator of income per capita that a number used up till now were considered have some weakness. Although it was easy to gained, the data of income per capita has been "aggregate" to all economic sectors, so it was not indicated description per sector. Study about the productivity of worker per sub sector will be expected can cover apart of the present weakness. The result of this study was indicated the presents of business performance variation and worker productivity viewed according to economic sectors. A number of external and internal factors of worker were also showed the various effect based on the economic sectors. Therefore, to motivate productivity of each sector will be needed policy intervention which to take care of the such as variation.

PENDAHULUAN

Situasi perekonomian sampai saat ini menunjukkan adanya gejala kemungkinan timbulnya kelambanan penyebaran sektor modern ke daerah-daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan dana yang dibarengi dengan keterbatasan permintaan di dalam dan di luar negeri. Keadaan demikian diperkirakan masih akan tetap berlanjut sedikitinya selama periode jangka menengah di masa yang akan datang, sehingga difikirkan pola lain pengembangan ekonomi daerah sebagai substitusi sementara terhadap

kelambanan pengembangan sektor industri, guna tetap memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Langkah demikian itu seyogyanya tidak terlepas dari rangkaian pengembangan sektor industri di masa yang akan datang. Di lain pihak, langkah tersebut semestinya tetap berorientasi pada penyebaran pembangunan dan hasil-hasilnya ke daerah-daerah tingkat II, agar tetap sinkron dengan strategi kebijaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di seluruh wilayah nusantara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijaksanaan ini adalah melihat besarnya pendapatan per kapita di setiap kabupaten/kotamadya. Daerah tingkat II yang lebih rendah pendapatan perkapitanya dapat memperoleh perhatian pengembangan ekonomi yang lebih khusus.

Tetapi sekalipun indikator pendapatan perkapita ini dapat diperoleh dengan mudah, namun dirasakan mempunyai kelemahan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk

-
- M. Tahir Kasnawi, lahir di Rappang 13 September 1949. Memperoleh Master dalam bidang Kependudukan di Univ. Gajah Mada (1985) dan Doktor dalam bidang Social Demography di University of Adelaide, Australia (1990). Sekarang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

mencapai tujuan tersebut. Kelemahannya adalah karena pendapatan perkapita per propinsi atau per kabupaten bersifat "meng-agregate" sektor-sektor ekonomi sehingga:

- Kurang nampak indikasi yang menunjukkan sektor mana yang memerlukan perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kerjanya, guna terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi nasional di daerah ini.
- Tidak menunjukkan karakteristik yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja per sektor di tingkat kabupaten/kotamadya maupun pada tingkat propinsi.

Indikator yang diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan tersebut adalah produktivitas tenaga kerja per sektor dan sub sektor, termasuk sektor pertanian yang menyumbang sekitar 40 persen terhadap total PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 1996.

Masalah yang dihadapi jika indikator produktivitas yang akan digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah belum tersedianya data produktivitas tenaga kerja per sub sektor di Sulawesi Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi tersebut. Tulisan ini akan mengulas data mengenai hal tersebut. Data diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 pada 12 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Pemilihan sub-sektor yang diteliti dilakukan secara *stratified random* dengan terlebih dahulu menyeleksi sektor-sektor yang paling dominan dalam perekonomian (selain sektor pertanian), terutama dilihat dari peranan sektor tersebut dalam total PDRB dan total penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Selanjutnya sektor utama yang menjadi obyek studi, yaitu: 1) **Industri** dengan sub sektor industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri dari kayu, bambu dan rotan, industri dari kertas, industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam; 2) **Sektor konstruksi/bangunan** yang meliputi sub-sub sektor konstruksi gedung, dan sub

sektor instalasi gedung; 3) **Sektor perdagangan** yang meliputi sub-sub sektor perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa restoran, rumah makan dan bar, dan sub sektor jasa akomodasi; 4) **Transportasi dan komunikasi** yang terdiri dari sub sektor angkutan darat, angkutan air, pergudangan, dan komunikasi; dan 5) **Sektor jasa-jasa** yang meliputi jasa perusahaan/perorangan.

Populasi penelitian meliputi unit-unit usaha pelaku ekonomi. Pemilihan sampel dari populasi dilakukan berdasarkan kombinasi metode purposive dan metode strata (*stratified random sampling*) pada tiap sub sektor yang diteliti. Kriteria penentuan kelompok dan strata sampel didasarkan pada jenis komoditas dan skala usaha pada setiap sub sektor. Kriteria skala usaha didasarkan pada besarnya modal usaha dan pemanfaatan tenaga kerja. Besarnya sampel yang terpilih adalah 388 unit usaha (pelaku ekonomi). Data sekunder yang telah tersedia juga banyak dimanfaatkan dalam studi ini.

KONSEP DASAR DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Dalam literatur ekonomi sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seseorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah *output* dalam satu satuan waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa secara nyata, seseorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya, belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang di milikinya. Ananta (1990) mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja adalah pencerminan dari mutu tenaga kerja jika hal-hal lain dianggap tetap sama. Menurutnya, perubahan (peningkatan) produktivitas kerja dapat terjadi karena pengaruh beberapa hal yaitu: a) sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar atau mutu yang lebih baik, b) sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak atau mutu yang lebih baik, c)

mutu modal manusia itu sendiri yang meningkat, dan d) kondisi dan lingkungan kerja yang lebih baik. Peranan sumber daya alam dalam peningkatan produktivitas baik dilihat dari jumlah maupun mutunya memang sangat penting. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa faktor peranan tersebut tidak selalu sama di setiap negara. Sebagai ilustrasi, Singapura adalah sebuah negara kecil yang memiliki sumber daya alam yang sangat minim, namun dikenal sebagai negara yang telah berhasil memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki bukan penghalang untuk meningkatkan produktivitasnya.

Selanjutnya Arsyad Anwar (dikutip dari Wiyono, 1996) mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh enam hal, yaitu a) perkembangan barang modal per pekerja, b) perbaikan tingkat keterampilan, pendidikan, dan kesehatan pekerja, c) meningkatkan skala usaha, d) perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, e) perubahan komposisi output dari tiap sektor atau sub sektor, dan f) perubahan teknik produksi. Sementara Basri (1996) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pemanfaatan kapasitas dari berbagai sektor. Produktivitas tenaga kerja rendah karena pemanfaatan kapasitas produksi rendah. Sebetulnya pekerja bisa menghasilkan produk lebih banyak, tetapi karena pemanfaatan kapasitas rendah, sehingga produktivitasnya rendah. Jadi dengan demikian rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat disebabkan oleh faktor *underutilized* tenaga kerja yang tersedia di setiap sektor.

Dengan demikian produktivitas tenaga kerja secara umum ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu: 1) Unsur tenaga kerja itu sendiri, termasuk metode kerjanya, kesehatannya, tingkat pendidikannya, ke-

biasaannya, dan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya, kompensasi kerja (upah atau gaji) dan lain sebagainya yang bersumber dari diri tenaga kerjanya, 2) Komoditas yang diolah termasuk sumber daya alam (lahan, dsb), teknik pelaksanaannya termasuk tingkat kejenuhan kapasitas produksi terutama pada sektor non pertanian, 3) Peralatan atau fasilitas penunjang tenaga kerja, termasuk faktor lingkungan kerjanya.

BEBERAPA TEMUAN STUDI

Ada tujuh belas sub sektor yang termasuk cakupan dalam kajian ini. Namun untuk penyederhanaan analisis, maka secara garis besar sub sektor tersebut di bagi ke dalam dua sektor lapangan pekerjaan utama. Pertama, sektor industri (*manufacture*) yang mencakup sub sektor industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kayu, bambu dan rotan, industri kertas, industri barang galian bukan logam, dan industri barang galian dari logam, konstruksi bangunan, dan sub sektor instalasi bangunan.

Kedua, sub sektor yang termasuk ke dalam *sektor jasa (service)* yaitu perdagangan besar, perdagangan kecil, restoran dan rumah makan, akomodasi, angkutan darat, angkutan air, pergudangan, komunikasi, dan sub sektor jasa seperti lembaga pendidikan/pelatihan, konsultan dan notaris.

a. Umum

Secara umum tingkat penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan masih rendah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi hanya mampu mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih kecil. Hal ini nampak dari hasil SUPAS 1985 dan 1995 seperti terlihat pada tabel.1.

Tabel 1
Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja
menurut Sektor di Sulawesi Selatan
Tahun 1985 dan 1995

Sektor Ekonomi Utama	Tenaga Kerja			PDRB (dalam Rp Juta) Harga Konstan 1983		
	1985	1995	Pert. (%)	1985	1995	Pert. (%)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	1193563 (59,54)	1392909 (53,35)	1,5	871818 (49,40)	2019143 (38,13)	8,76
Pertambangan dan Penggalan	10626 (0,53)	9568 (0,37)	-1,0	16145 (0,91)	189959 (3,59)	17,06
Industri Pengolahan	182409 (9,10)	177255 (6,79)	-0,2	95148 (5,39)	651537 (12,30)	11,10
Listrik, Gas, dan Air	2948 (0,15)	4399 (0,17)	4,0	18193 (1,03)	56278 (1,06)	10,95
Bangunan	50814 (2,53)	65128 (2,49)	2,5	67900 (3,85)	299239 (5,65)	5,99
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan	243587 (12,15)	403779 (15,47)	5,1	156899 (8,89)	769313 (14,53)	7,20
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	63045 (3,15)	90476 (3,47)	3,6	179057 (10,15)	352854 (6,66)	7,02
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan	5417 (0,27)	6724 (0,26)	2,1	132825 (7,53)	333705 (6,30)	9,65
Jasa-Jasa	252197 (12,58)	460644 (17,64)	6,2	226779 (12,85)	623898 (11,78)	10,65
T o t a l	2004606 (100,0)	2610882 (100,0)	2,68	1764764 (100,0)	5295925 (100,0)	5,62

Keterangan: (...) adalah angka persentase.

Sumber: Data diolah berdasarkan Hasil SUPAS 1985 dan 1995, serta data Pendapatan Regional Sulawesi Selatan, Kantor Statistik Sulsel, 1995

Selama periode 1985-1995, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,62% per tahun. Sedang pada periode yang sama, laju pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja (penyerapan tenaga kerja) hanya sebesar 2,68% tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu mendorong pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 0,47%. Daya serap tenaga kerja yang masih relatif rendah tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dicapai melalui penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi. Penggunaan teknologi tinggi tersebut kurang menguntungkan nasib tenaga kerja, karena cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja yang terserap dalam proses produksi yang menggunakan teknologi tinggi disebabkan dua faktor utama yaitu; *pertama*, karena penggunaan teknologi modern memang mengurangi penggunaan tenaga kerja (substitusi tenaga kerja) pada setiap unit kegiatan, meskipun hasil (produksi) yang dicapai lebih besar. *Kedua*, kurangnya tenaga kerja terserap karena kondisi tenaga kerja yang kurang mampu beradaptasi dengan teknologi modern, antara lain karena tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada jenis pekerjaan tertentu.

Oleh karena itu tidak jarang terdapat lowongan kerja yang tersedia tidak dapat terisi, karena persyaratan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pencari kerja. Ketidakmampuan tenaga kerja untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi karena kualitas mereka terutama tingkat pengetahuan yang tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah. Hasil SUPAS 1995 menunjukkan bahwa sekitar 68% dari jumlah angkatan kerja hanya berpendidikan SD ke bawah, dan hanya 32% sisanya yang berpendidikan sekolah lanjutan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan sehingga tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor-sektor

marginal. Pada sektor-sektor tersebut umumnya banyak menyerap tenaga kerja, namun produktivitasnya rendah. Tenaga kerja dengan kualitas rendah tersebut umumnya terserap pada sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Pola penyerapan tenaga kerja seperti itu diperkirakan masih berlangsung sampai tahun 2003. Sampai saat itu, peranan sektor pertanian di Sulawesi Selatan masih dominan dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu masih sekitar 44% dari total tenaga kerja yang bekerja (total kesempatan kerja). Selain sektor pertanian, sektor tersier terutama sektor jasa-jasa, sektor perdagangan juga diperkirakan memegang peranan yang cukup penting. Menonjolkan peranan sektor pertanian dan sektor tersier tersebut erat kaitannya dengan kualitas tenaga kerja yang masih cukup rendah yang lebih mudah memasuki sektor tersebut.

b. Kinerja Usaha

Perkembangan kinerja usaha ditentukan oleh beberapa faktor. Selain tenaga kerja, kinerja usaha juga antara lain ditentukan jenis status badan usaha, penyediaan dana, penyediaan bahan baku serta prospek pasar dari *output* yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dilihat dari status badan usaha, maka badan usaha yang berbentuk perseroan lebih mudah mengembangkan usaha dibandingkan yang berstatus badan usaha lainnya. Hal ini karena perusahaan yang berbentuk perseroan (PT) lebih mudah memperluas skala usaha dengan menambah modal usaha dibandingkan usaha perorangan atau bentuk badan usaha lainnya. Oleh karena itu, umumnya badan usaha berbentuk PT tergolong usaha besar, sedangkan usaha perorangan umumnya tergolong usaha kecil dan menengah. Sebagian besar dari perusahaan yang terjaring dalam studi ini merupakan usaha perorangan.

Dari sejumlah badan usaha yang dikelompokkan dalam sub sektor terjaring dalam penelitian ini, terdapat tujuh sub sektor yang menggunakan bahan baku. Dari sejumlah sub sektor tersebut terdapat variasi perkembangan penggunaan bahan baku, di antaranya selama 2

tahun beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan penggunaan bahan baku, yang lainnya mengalami penurunan. Perkembangan penggunaan bahan baku merupakan salah satu indikasi meningkatnya volume kegiatan usaha. Sub sektor (jenis usaha) yang mengalami peningkatan penggunaan bahan baku lebih dari dua kali lipat antara lain sub sektor industri dari kertas dan industri bahan galian bukan logam. Hal ini menarik dicermati mengingat kondisi makro ekonomi kita yang tengah dilanda krisis ekonomi dimana se-bagian perusahaan telah mengalami penurunan kegiatan usaha, tetapi masih ada diantaranya yang dapat meningkatkan kegiatan usaha.

Luasnya wilayah pemasaran merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja usaha. Hal ini karena luasnya wilayah pemasaran menunjukkan prospek permintaan produksi yang cukup baik.

Studi ini menunjukkan bahwa *output* yang dihasilkan masih lebih dominan dipasarkan pada pasar lokal. Hal ini nampak pada tabel 2, di mana sekitar 60% produksi dari sub-sub sektor yang terjaring mempunyai wilayah pemasaran lokal (kabupaten) dan hanya sekitar 20% di antaranya memiliki wilayah pemasaran nasional dan ekspor.

Tabel 2
Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Per Sub Sektor
di Sulawesi Selatan

Sub Sektor	Wilayah Pemasaran Hasil (%)				Total	
	Kab./ Kodya	Propinsi	Nasi- onal	Ekspor	%	N
Industri makanan & minuman	47,8	21,7	21,7	8,7	100,0	23
Industri tekstil	27,3	18,2	54,5	-	100,0	22
Industri kayu, bambu & rotan	44,0	24,0	32,0	-	100,0	25
Industri kertas	70,6	17,6	11,8	-	100,0	17
Indus. Bhn galian bkn logam	42,9	28,6	28,6	-	100,0	21
Industri barang dari logam	50,0	27,8	16,7	5,6	100,0	18
Konstruksi bangunan	52,0	32,0	16,0	-	100,0	25
Instalasi bangunan	80,0	15,0	5,0	-	100,0	20
Perdagangan besar	54,5	45,5	-	-	100,0	11
Perdagang. meneng. & kecil	92,1	7,9	-	-	100,0	38
Restaurant dan rumah makan	95,2	4,2	-	-	100,0	21
Akomodasi	54,5	4,5	22,7	8,2	100,0	22
Angkutan darat	65,7	34,3	-	-	100,0	35
Angkutan air	35,7	25,0	35,7	7,7	100,0	28
Pergudangan	72,7	18,2	9,1	-	100,0	11
Komunikasi	93,3	6,7	-	-	100,0	15
J a s a	77,8	8,3	11,1	2,8	100,0	36
T o t a l						
%	61,6	19,3	15,7	3,4	100,0	388
N	239	75	61	13		

Sumber: Data Primer Hasil Survey Sampel, 1998

Jenis usaha yang mempunyai wilayah pemasaran lokal (kabupaten) adalah usaha yang dibangun untuk menghasilkan *output* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan nampaknya kurang menguntungkan bila dipasarkan keluar kabupaten. Usaha/sub sektor yang mampu memasarkan produksinya di luar propinsi masih relatif kecil dan umumnya jenis usaha yang sudah dapat melakukan ekspansi usaha dengan memperbesar skala usaha.

Kebanyakan badan usaha setiap sub sektor masih berstatus/jenis perorangan. Pengecualian dari keadaan tersebut hanya terdapat pada berbagai usaha pada sub sektor angkutan air dan komunikasi yang lebih banyak berbentuk PT. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan jenis usaha yang berkembang dikelola secara kecil-kecilan dengan manajemen sederhana.

Lima sub sektor yang mempunyai rata-rata nilai produksi terkecil, dua di antaranya adalah pada sektor industri (*manufacture*) yaitu industri kertas dan instalasi bangunan, sementara selebihnya tergolong sektor jasa (*service*) yaitu restoran dan rumah makan, angkutan air, dan komunikasi. Namun khusus pada sub sektor industri kertas telah pula mengalami peningkatan pemakaian bahan baku yang sangat tinggi (sekali pun juga terendah nilainya). Namun peningkatan pemakaian bahan baku industri kertas tidak semata mengindikasikan peningkatan kinerja sub sektor ini, tetapi juga akibat lonjakan harga bahan baku yang sangat tinggi terutama berkaitan dengan terjadinya krisis moneter. Hal itu akibat dari ketergantungan yang besar sejumlah unsur bahan baku sektor ini terdapat impor.

Hampir semua produk setiap sub sektor dikonsumsi dalam kabupaten, dan hanya 3,4% yang masuk ke pasar luar negeri. Sub sektor yang terbilang sedikit proporsi produksinya

yang dipasarkan dalam kabupaten (kurang dari 50%) hanyalah industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kayu bambu dan rotan, industri barang galian bukan logam dari sektor industri dan sub sektor angkutan air yang tergolong sektor jasa. Dari sejumlah itu, hanyalah industri tekstil yang diperkirakan produksinya mencapai sekitar 50% yang dipasarkan secara nasional. Kebanyakan produk tersebut dipasarkan langsung ke konsumen, dan hanya kurang dari 20% yang dipasarkan melalui jasa pihak lain.

Rata-rata kondisi pasar saat ini menurut produsen bersifat moderat, di mana terdapat sejumlah sub sektor yang mempunyai kemampuan produksi yang lebih besar daripada potensi pasar, dan sebaliknya dalam jumlah hampir sama memiliki kemampuan produksi yang lebih kecil dari potensi pasar. Tetapi hampir seperdua dari total responden menyatakan kemampuan produksi sama dengan kemampuan pasar. Lima sub sektor usaha terbanyak yang mengatakan potensi pasar masih lebih besar daripada kemampuan produksi kebanyakan tergolong sektor industri yaitu sub sektor industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kayu bambu dan rotan, dan industri barang galian bukan logam. Sementara yang tergolong sektor jasa hanyalah pergudangan. Namun berbeda dengan keadaan pasar saat ini, ramalan potensi pasar di masa depan yang menyatakan akan "meningkat" atau "menurun" semakin besar proporsinya dan hanya sekitar 20% yang melihatnya akan sama saja dengan keadaan sekarang. Keadaan ini menunjukkan perkiraan pasar yang sangat dinamis yang sebagian besar mungkin dibentuk oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil belakangan ini.

Tabel 3
Rata-Rata Potensi Pasar Hasil Produksi
pada Masa Lalu Sampai Saat Ini Per Sub Sektor
di Sulawesi Selatan menurut Konsumen

Sub Sektor	Rata-Rata Potensi Pasar (%)			Total	
	> Kemam- puan Produksi	=Kemam- puan Produksi	<Kemam- puan Produksi	%	N
Industri makanan & minuman	39,1	34,8	26,1	100,0	23
Industri tekstil	31,8	54,5	13,6	100,0	22
Indus. kayu, bambu & rotan	36,0	44,0	20,0	100,0	25
Industri kertas	23,5	47,1	29,4	100,0	17
Indus.bhn galian bkn logam	38,1	52,4	9,5	100,0	21
Industri barang dari logam	22,2	55,6	22,2	100,0	18
Konstruksi bangunan	8,0	56,0	36,0	100,0	25
Instalasi bangunan	30,0	60,0	10,0	100,0	20
Perdagangan besar	27,3	63,6	9,1	100,0	11
Perdag. Menengah & kecil	21,1	60,5	18,4	100,0	38
Restaurant & rumah makan	28,6	61,9	9,5	100,0	21
Akomodasi	27,3	31,8	40,9	100,0	22
Angkutan darat	11,4	57,1	31,4	100,0	35
Angkutan Air	17,9	53,6	28,6	100,0	28
Pergudangan	36,4	45,5	18,2	100,0	11
Komunikasi	26,7	46,7	26,7	100,0	15
J a s a	30,6	27,8	41,7	100,0	36
Total					
N	100	193	95		388
%	25,8	49,7	24,5	100,0	

Sumber: Data Primer Hasil Survey Sampel, 1998

Secara umum rata-rata rasio antara tenaga administrasi dan tenaga produksi pada semua sub sektor adalah 1 : 7,8 di mana pada setiap usaha terdapat rata-rata 3 tenaga administrasi dan 20 tenaga produksi. Namun keadaan tenaga kerja menurut jabatannya tersebut sangat bervariasi sesuai jenis usaha. Sub sektor usaha yang cukup besar menyerap tenaga kerja per unit usaha adalah industri tekstil, industri kayu bambu dan rotan, industri barang dari logam, konstruksi bangunan dari sektor industri, dan sub sektor perdagangan besar, akomodasi, dan angkutan darat yang tergolong sektor jasa. Tetapi daya serap tenaga kerja per unit usaha menurut sektor tersebut lebih menggambarkan skala besar kecilnya usaha. Dalam kaitan dengan daya serap tenaga kerja, juga perlu dipertimbangkan sejumlah sub sektor yang per unit usaha tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja upahan, karena banyaknya unit usaha berbentuk perorangan sehingga tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut juga banyak berstatus pekerja keluarga. Contoh sub sektor usaha seperti itu adalah perdagangan kecil.

c. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB riel (PDRB menurut harga konstan) dan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan dan per sektor di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data PDRB Sulawesi Selatan tahun 1995 dan tahun 1997, serta Hasil SUSENAS 1997, maka diperoleh angka produktivitas tenaga kerja Sulawesi Selatan pada tahun 1995 dan 1997. Dari hasil analisis tersebut nampak bahwa secara total produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan periode 1995-1997 meningkat dari Rp 3,24 juta pertahun pada tahun 1995 menjadi Rp 3,70 juta pertahun pada tahun 1997 (lihat tabel 4).

Dilihat dari perkembangan produktivitas tiap sektor, nampak pada tabel tersebut ada sektor-sektor yang produktivitas tenaga kerjanya meningkat atau stabil bahkan beberapa sektor menunjukkan produktivitas yang menurun. Sektor-sektor ekonomi di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan produktivitas antara lain sektor industri, perdagangan, keuangan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerjanya antara lain sektor pertambangan, listrik, gas dan air, serta konstruksi. Sektor yang produktivitasnya relatif stabil pada periode tersebut adalah sektor pertanian serta sektor transport dan komunikasi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada beberapa sektor periode 1995-1997 dapat terjadi karena laju pertumbuhan produksi (PDRB riel) lebih tinggi dari laju pertumbuhan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Tabel 4
Produktivitas
Tenaga Kerja Per Sektor di Sulawesi Selatan, Tahun 1995

Sektor	Produktivitas (dalam Rp Juta)	
	1995	1997
1. Pertanian	2,3092	2,3275
2. Pertambangan	32,8618	18,4923
3. Industri	6,0998	7,8839
4. Listrik	197,5813	16,6724
5. Konstruksi	7,6147	4,7072
6. Perdagangan	3,5010	2,1282
7. Transportasi dan Komunikasi	6,1673	3,5184
8. Keuangan	79,5170	47,9353
9. Jasa-Jasa	2,4974	2,8034
Total	3,2488	3,7048

Sumber: Data Diolah Dari Hasil SUPAS 1995 dan SUSENAS 1997.
Kantor Statistik Sulsel, 1997.

Produktivitas tenaga kerja tiap kabupaten dapat dihitung dengan membagi nilai PDRB riil dengan jumlah penggunaan tenaga kerja. Berdasarkan data PDRB tahun 1995 dan PDRB tahun 1997 dalam harga konstan serta data hasil SUPAS 1995 dan SUSENAS 1997, maka terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang merupakan angka tertinggi dari semua daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, baik pada tahun 1995 maupun pada tahun 1997. Pada tahun 1995, produktivitas tenaga kerja di Kotamadya Ujung Pandang sebesar Rp. 7,77 juta pertahun dan meningkat menjadi Rp. 8,99 juta pada tahun 1997. Urutan kedua yang memiliki angka produktivitas tenaga kerja tertinggi, adalah Kabupaten Pangkep dan Kotamadya Pare-Pare masing-masing dengan angka produktivitas pada tahun 1997 sebesar Rp. 4.83 juta dan Rp 4,84 juta pertahun. Sedangkan kabupaten dengan angka produktivitas terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan produktivitas

tenaga kerjanya pada tahun 1995 sebesar Rp 1,57 juta dan hanya meningkat menjadi Rp 1,63 juta pertahun pada tahun 1997.

Selama periode 1995-1997, sebagian besar daerah tingkat II mengalami kenaikan angka produktivitas tenaga kerja. Pengecualiannya adalah beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bantaeng, Maros, Wajo, Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja, dengan angka produktivitas tenaga kerja relatif konstan. Bahkan angka produktivitas tenaga kerja Kabupaten Bantaeng sedikit menurun selama periode 1995-1997.

Membandingkan angka produktivitas tenaga kerja total Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, maka pada tahun 1997 terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dari angka produktivitas tenaga kerja Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Gowa, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Maros, Bone, Pinrang, Majene, Kotamadya

Ujung Pandang dan kotamadya Pare-Pare. Sedangkan 14 kabupaten lainnya memiliki angka produktivitas lebih rendah dari angka produktivitas Sulawesi Selatan.

Selanjutnya produktivitas tenaga kerja persektor tiap kabupaten/kotamadya menunjukkan adanya sektor-sektor tertentu pada tiap kabupaten yang memiliki produktivitas tinggi dan sektor-sektor yang memiliki produktivitas yang relatif rendah. Penentuan tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja persektor di tentukan berdasarkan tingkat produktivitas total pada masing-masing kabupaten. Dengan demikian suatu sektor dikatakan memiliki angka produktivitas relatif tinggi apabila lebih tinggi dibandingkan angka produktivitas tenaga kerja kabupaten. Dan sebaliknya suatu sektor dengan angka produktivitas rendah apabila produktivitas tenaga kerja pada sektor tersebut lebih rendah dari produktivitas tenaga kerja untuk kabupaten yang bersangkutan.

Tabel 5 memperlihatkan sektor-sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja

tertinggi dan terendah pada tiap kabupaten /kodya di Sulawesi Selatan. Pada tabel tersebut nomor urut sektor ditulis secara berurut menurut relatif tinggi atau rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor tersebut pada masing-masing Dati II. Misalnya pada kolom "produktivitas tinggi" nomor sektor di tulis secara berurut dari kiri ke kanan menurut tingginya produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut. Pada kabupaten Selayar misalnya pada kolom produktivitas tinggi, tertulis nomor sektor berurut 8, 5, 7, 6, yang berarti sektor yang memiliki produktivitas tertinggi adalah sektor keuangan kemudian disusul secara berurut dengan sektor konstruksi, sektor angkutan dan sektor perdagangan. Sedangkan pada kolom "produktivitas rendah" dari tabel tersebut tertulis nomor sektor menurut urutan produktivitas terendah sampai pada produktivitas yang lebih tinggi.

Tabel 5
Kabupaten/Kodya dengan Sektor-Sektor yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Selatan Tahun 1997

No.	Kabupaten/Kodya	Sektor	
		Produktivitas Rendah	Produktivitas Tinggi
1.	Selayar	1, 3, 2	8, 5, 7, 6
2.	Bulukumba	2, 9, 1	8, 6, 4, 5
3.	Bantaeng	1, 2, 7	8, 6, 3, 4
4.	Jeneponto	3, 7, 6	8, 2, 6, 9
5.	Takalar	6, 1, 7	8, 4, 5, 3
6.	Gowa	5, 6, 7	8, 2, 4, 3
7.	Sinjai	6, 2, 1	8, 4, 5, 3
8.	Maros	3, 6, 1	8, 7, 5, 2
9.	Pangkep	6, 1, 9	8, 3, 2, 4
10.	Barro	6, 9, 1	8, 5, 4, 2
11.	Bone	6, 9	8, 5, 4, 3
12.	Soppeng	1, 6	4, 5, 7, 3
13.	Wajo	9, 3	7, 2, 5, 6
14.	Sidrap	3, 9, 1	8, 2, 5, 4
15.	Pinrang	6, 1	4, 5, 3, 7
16.	Enrekang	1	8, 2, 5, 6
17.	Luwu	1, 6	2, 4, 5, 7
18.	Tator	1, 2	8, 3, 5, 4
19.	Polmas	3, 2, 1	5, 6, 7, 5
20.	Majene	1, 2	5, 6, 7, 9
21.	Mamuju	6, 1	2, 3, 4, 7
22.	Ujung Pandang	9	8, 3, 4, 9
23.	Pare-Pare	9, 6	8, 5, 2, 7
	Sulawesi Selatan	1, 9	8, 2, 4, 3

Keterangan: 1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
 2. Pertambangan dan penggalian
 3. Industri pengolahan
 4. Listrik, gas, dan air
 5. Konstruksi
 6. Perdagangan, rumah makan, dan hotel
 7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi
 8. Keuangan, asuransi, dan usaha persewaan
 9. Jasa-jasa

Sumber: Data Diolah Dari Hasil SUPAS 1995 dan SUSENAS 1997.
Kantor Statistik Sulsel, 1997

Beberapa masalah yang menonjol pada setiap sub sektor, dapat diringkas melalui beberapa variabel utama dalam kajian ini. Sub sektor yang tergolong ke dalam sektor industri dan yang didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kayu bambu dan rotan, industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam, dan instalasi bangunan. Sedangkan pada sektor jasa terjadi pada sub sektor perdagangan menengah dan kecil, restoran dan rumah makan, angkutan air, dan pergudangan. Meskipun dari sub sektor ini kebanyakan tenaga kerja berpendidikan rendah, namun tidak selalu menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Ini disebabkan karena beberapa jenis pekerjaan dalam sub sektor tidak terlalu mensyaratkan pendidikan yang terlalu tinggi.

Tingkat penguasaan keterampilan kerja yang rendah pada sektor industri terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman, dan industri barang galian bukan logam. Sementara pada sektor jasa hanyalah bertaraf sedang dan tinggi. Khusus variabel pengalaman kerja, nampaknya yang memiliki pengalaman kerja yang rendah pada sektor industri terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman, industri kayu bambu dan rotan, industri kertas, konstruksi bangunan, dan instalasi bangunan. Sementara pada sektor jasa terjadi pada sub sektor; perdagangan besar, perdagangan menengah dan kecil, komunikasi, dan jasa.

Mobilitas tenaga kerja yang tinggi (relatif bermasalah karena berpeluang memperendah keterampilan kerja) terjadi pada sektor industri sub sektor; industri kayu bambu dan rotan, industri barang dari logam, dan konstruksi bangunan. Sementara pada sektor jasa hanya terjadi pada angkutan darat. Kondisi kesehatan yang buruk bagi pekerja (pengalaman pernah sakit yang disebabkan oleh pekerjaan), hanya terjadi pada sub sektor industri barang galian bukan logam (sektor industri). Untuk sektor jasa, hampir tidak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik/kesehatan. Ini berarti pada industri barang galian bukan

logam saja yang mendesak perlu ditempuh berbagai langkah perbaikan.

Salah satu variabel lainnya (dari faktor internal) adalah berkaitan dengan etos kerja. Tingkat etos kerja yang relatif rendah pada sektor industri terjadi pada sub sektor industri tekstil, dan industri kayu bambu dan rotan, sementara yang tergabung ke dalam sektor jasa terjadi pada angkutan air, dan pergudangan. Salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya etos kerja pada sub sektor tersebut adalah rendahnya keinginan/kesempatan untuk pengembangan diri yang berkaitan dengan proses dari pekerjaan.

Ketersediaan fasilitas penunjang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan atau usaha relatif kurang tersedia pada sektor industri, yang terjadi pada sub sektor industri tekstil, industri kayu bambu dan rotan, dan instalasi bangunan. Sedangkan pada sektor jasa terjadi pada sub sektor perdagangan besar, perdagangan menengah dan kecil, angkutan air, dan pergudangan. Pada indikator lain yang terlihat di sektor industri yaitu bahwa kapasitas produksi relatif rendah pemanfaatannya pada industri tekstil serta industri kayu bambu dan rotan. Pada sub sektor jasa terjadi pada perdagangan besar, perdagangan menengah dan kecil, serta akomodasi. Ini berarti bahwa banyak faktor-faktor yang menganggur (belum dimanfaatkan) pada sub sektor ini. Kebanyakan penyebabnya adalah terkait dengan masalah pemasaran yang juga berkaitan dengan berbagai aspek lainnya.

Kondisi lingkungan kerja yang relatif kurang baik (pada sektor industri), terjadi pada sub sektor industri kertas, industri barang dari logam, dan instalasi bangunan. Sementara pada sektor jasa terjadi pada perdagangan kecil dan pergudangan. Rendahnya kondisi lingkungan kerja ini antara lain ditentukan oleh tidak adanya pembagian kerja, dan tidak berlangsungnya hubungan industrial yang memadai, seperti ketersediaan jaminan keselamatan kerja. Aspek yang berkaitan dengan kompensasi atau imbalan kerja yang buruk misalnya, terjadi pada sub sektor industri

tekstil, industri kertas, industri barang dari logam, dan instalasi bangunan dalam sektor industri. Sementara pada sektor jasa terjadi pada sub sektor perdagangan menengah dan kecil, serta pergudangan. Beberapa indikator yang tergabung di sini antara lain adalah tingkat gaji/pendapatan, dan berbagai tunjangan lainnya.

Hubungan fungsional antara produktivitas dan variabel-variabel determinan dapat dilihat dari hasil analisis regresi dan korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan upah minimum merupakan faktor yang sangat penting. Sebab upah/gaji pekerja selain sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan pekerja, upah atau gaji juga merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan prestasi (produktivitas tenaga kerja). Pengaruh upah terhadap prestasi kerja (produktivitas) nampak cukup signifikan pada hampir semua sub sektor kecuali pada sub sektor konstruksi bangunan, instalasi bangunan, dan perdagangan kecil dan rumah makan. Pada keempat sub sektor terakhir ini, produktivitas tidak banyak dipengaruhi oleh upah/ kompensasi imbalan kerja. Ketidak bermakna-an pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada sub sektor tersebut mungkin ditentukan oleh sistem penetapan upah dengan nilai produksi. Penentuan upah pada sub-sub sektor tersebut biasanya dengan upah tetap per unit waktu (misalnya upah harian) sedangkan nilai produksi dari kegiatan pada sub sektor tersebut (misalnya konstruksi bangunan) ditetapkan menurut sistem tender. Demikian juga pada industri makanan dan tekstil nampak pengaruh nyata dan negatif upah terhadap peningkatan produksi.

Faktor-faktor eksternal dan internal yang paling berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di sub sektor industri makanan adalah pengembangan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja, pendidikan, keterampilan dan etos kerja. Sedangkan upah/gaji justru berpengaruh negatif terhadap perkembangan produktivitas. Hal ini karena sistem pengupahan pada sub sektor ini umumnya merupakan upah tetap per unit waktu

(per hari atau per bulan) dengan hampir tidak pernah menggunakan sistem bonus.

Oleh karena itu intervensi kebijakan perlu diarahkan pada upaya pengembangan kualitas tenaga kerja, penetapan upah minimum, dan sistem bonus, peningkatan keterampilan dan pembinaan etos kerja.

Pada sub sektor industri tekstil, kondisinya hampir sama pada sub sektor industri makanan dan minuman, dimana faktor yang paling dominan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah pendidikan dengan pengembangan kualitas tenaga kerja, etos kerja, kondisi fisik dan keterampilan tenaga kerja. Sedang upah mempunyai pengaruh negatif pada peningkatan produktivitas. Dengan demikian intervensi kebijakan tidak terlalu berbeda dengan sub sektor industri makanan.

Demikian juga halnya pada sub sektor industri kertas, industri kayu bambu dan rotan, industri logam dan bukan logam, faktor-faktor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, keterampilan, kondisi fisik dan etos kerja adalah variabel-variabel yang penting penentu prestasi (produktivitas) tenaga kerja. Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di sub-sub sektor tersebut perlu intervensi kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor tersebut.

Pada sub sektor konstruksi bangunan dan instalasi bangunan, nampak faktor-faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah keterampilan, pengalaman kerja dan etos kerja. Sedangkan faktor pendidikan tidak terlalu berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja produksi, misalnya buruh bangunan pada sub sektor tersebut justru sebagian besar berpendidikan rendah. Pada sektor jasa yang meliputi sub sektor perdagangan, akomodasi, rumah makan, angkutan dan komunikasi, dan sub sektor jasa nampak faktor-faktor dominan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja meliputi pendidikan dan keterampilan, pengalaman kerja, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Arah kebijakan tentunya untuk mempengaruhi

variabel-variabel tersebut agar produktivitas tenaga kerja lebih optimal

KEPUSTAKAAN

- Alatas, Secha dan E. Priyono. "Migrasi Penduduk dan Produktivitas Kerja," dalam *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, A. Ananta (ed.). Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1993.
- Ananta, Aris. "Modal Manusia dalam Pembangunan Ekonomi," dalam *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, A. Ananta (ed.). Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1990.
- Basri, Faizal H. "Seharusnya Ada Manajemen Partisipatif Antara Pihak Pengusaha dan Pekerja," *Warta Demografi*, No. 5 Tahun 1996, hal. 12-15.
- Campbell Mc. Connell. *Contemporary Labour Economics*. New York: Mc. Graw Hill, 1988.
- Pasay, N. Haidy A. "Produktivitas Pekerja dan Orientasi Usaha di Industri Pengolahan," dalam *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, A. Ananta (ed.). Jakarta: Lembaga Demografi, 1993.
- Wiyono, Nur Hadi. "Peningkatan Produktivitas: Mengapa Begitu Penting?," *Warta Demografi* No. 5 Tahun 1996, hal. 4-8.